Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025), pp. 124-132
ISSN:2775-6513

PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL, INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

M. Fahrul Farhan[1], Ahmad Kafrawi Mahfud[2], Qarina[3]
Email: mfahrulfarhan8@gmail.com

[1,2,3] Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This research was conducted due to the fluctuating poverty rate in Indonesia despite continuous government social assistance spending, and it aims to analyze the effect of social assistance expenditure, corruption perception index, and education level on poverty in Indonesia using a quantitative method with time series secondary data from 2004–2024 analyzed through multiple linear regression using Eviews 12, and the results show that simultaneously all independent variables significantly affect poverty (Prob F-statistic 0.0000) with an R^2 value of 0.916656, while partially social assistance spending has no significant effect on poverty (p=0.5988), the corruption perception index has a negative and significant effect (p=0.0013) and education level also has a negative and significant effect (p=0.0004), indicating that poverty reduction in Indonesia is more driven by anti-corruption governance and education improvement rather than the increase of social assistance, thus it is recommended that the government evaluate the targeting mechanism of social assistance, strengthen anti-corruption governance, and expand equitable and quality education as a long-term poverty alleviation strategy.

***Keywords**:* poverty, social assistance expenditure, corruption perception index, education.

ARTICLE INFO

Received 20 Agustus 2025
Accepted 17/11/2025
Online 11/12 2025

*Correspondence:
M. Fahrul Farhan
E-mail:
mfahrulfarhan8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya dalam periode pengamatan yang relevan. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak Eviews dengan data sekunder time series periode 2004–2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Prob F-statistic 0,0000) dengan nilai R^2 sebesar 0,916656, secara parsial belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (p=0,5988), indeks persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan (p=0,0013) serta tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (p=0,0004), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh keberhasilan pemberantasan korupsi dan peningkatan akses pendidikan dibandingkan peningkatan belanja bantuan sosial, sehingga direkomendasikan agar pemerintah mengevaluasi mekanisme bantuan sosial agar tepat sasaran, memperkuat tata kelola antikorupsi serta memperluas pemerataan dan kualitas pendidikan sebagai strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan jangka Panjang.

Kata kunci: kemiskinan, belanja bantuan sosial, indeks persepsi korupsi, pendidikan.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 124-132

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi topik yang dibahas dan diperdebatkan diberbagai forum nasional maupun internasional, sekalipun kemiskinan sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu menekan peningkatan jumlah penduduk miskin di dunia, terkhusus bagi negara berkembang. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi serta politik di tengah-tengah masyarakat (Ariwuni & Kartika, 2019).

Kemiskinan menunjukkan sebuah situasi yang serba kekurangan terutama dari segi ekonomi yang sangat tidak dikehendaki oleh mereka, namun akibat ketidakberdayaan menyebabkan kondisi tersebut harus dijalani. Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar *(basic need approach)*. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (pakaian dan sebagainya) yang bersifat mendasar. ”Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang (perkapita)per bulan di bawah garis kemiskinan (Yulsa & Idris, 2024).

Permasalahan kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Pada praktiknya, pembangunan daerah tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat kemiskinan sebagai konsekuensi dari proses pembangunan (Margareni dkk, 2016)

Dukungan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sangat diperlukan sebagai langkah protektif bagi masyarakat dari berbagai masalah sosial. Untuk itu, pemerintah melaksanakan program belanja bantuan sosial secara mandiri, tanpa keterlibatan sektor swasta. Belanja pemerintah di sektor lainnya pun turut berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bantuan sosial dianggap sebagai komponen vital, terutama untuk memperkuat kemampuan ekonomi kelompok miskin (Rizki dkk, 2023).

Korupsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena melemahkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, terjadi ketidakadilan sosial di mana yang kaya semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Korupsi juga menurunkan penerimaan pajak negara, menghambat semangat berwirausaha, serta mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran pemerintah untuk kepentingan publik menjadi berkurang. Untuk menilai tingkat korupsi secara global, digunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menggabungkan berbagai sumber informasi mengenai praktik korupsi (Yolanda & Alpon, 2021).

Salah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan adalah suatu jalan bagi negara untuk maju. Hal ini karena, pendidikan berkaitan langsung dengan pembentukan karakter serta pertahanan diri masyarakat dalam suatu bangsa. Maka pendidikan suatu masyarakat harus tinggi untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya, karena dengan pendidikan yang rendah maka menyebabkan kemampuan seseorang dalam mengembangkan

dirinya terbatas serta sulit untuk bersaing didunia kerja yang rata-rata tingkat pendidikan adalah prioritas utama dalam dunia kerja. Pendidikan adalah suatu modal serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (Adhitya, 2022).

JENIS DAN SUMBER DATA

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena pelaksanaanya meliputi analisis data dan interpretasi data yang diperoleh. Data kuantitatif menggunakan data *time series.* Demi mendukung pengolahan data, penelitian ini mengandalkan data sekunder.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode dokumentasi yang diperoleh dari website, jurnal, badan pusat statistik, transparancy Indonesia dan kementerian keuangan Indonesia.

METODE ANALISIS DATA

Untuk menganalisis pengaruh dari ketiga variabel, maka digunakan pendekatan kuadrat terkecil *(Ordinary Least Square).* Teknik analisis regresi linear berganda ini berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana variabel dependen (variabel Y) mengalami perubahan akibat pengaruh variabel independen (variabel X) yang telah ditentukan. Dengan demikian dalam menggunakan analisis ini, perubahan pada variabel terkait dapat diukur seiring dengan perubahan variabel bebas. Secara umum analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y= X_1 +X_2 +X3 \text{.....(1)}$$
$$Y= a +\beta_1 X_1 Ln+ \beta_2 X_2 Ln+ \beta_3 X_3 + e \text{.....(2)}$$

Dimana :

Y	= Tingkat Kemiskinan
X_1	= Belanja Bantuan Sosial
X_2	= Indeks Persepsi Korupsi
X_3	= Tingkat Pendidikan
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
e	= Standar error
Ln	= Logaritma natural

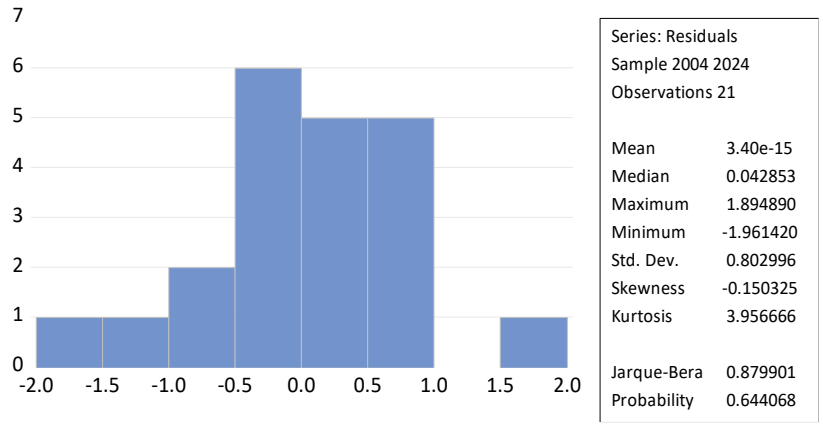
Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pengujian seperti uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data layak untuk digunakan, terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterskedastisitas dan uji multikolenearitas, serta pengujian yang lain seperti uji regresi linear berganda, uji parsial atau uji t untuk melihat keterkaitan antar variabel, uji simultan atau uji f dan uji koefisien determinasi.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 124-132

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis pengujian

Gambar 1 Uji Normalitas



Gambar 1 menunjukkan hasil Uji Normalitas dengan *J-B Test* diketahui bahwa nilai Probability *J-B* yaitu 0.644068 > 0,05 maka disimpulkan data dari penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1 Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentred VIF	Centered VIF
C	20.36292	563.7048	NA
X1	0.042818	82.13430	2.75634
X2	4.391469	1466.642	4.452444
X3	0.230904	432.4325	2.578658

Berdasarkan nilai Centered VIF menunjukkan nilai X1 belanja bantuan sosal sebesar 2.75634, X2 indeks persepsi korupsi 452444 dan X3 tingkat pendidikan nilai yang diperoleh lebih kecil dari 10, sehingga dapat di simpulkan bahwa model ini bebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test White			
F-statistic	1.265605	Prob. F (8,11)	0.3505
Obs*R-squared	10.68310	Prob. Chi-Square(8)	0.2981
Scaled explained SS	10.34972	Prob. Chi-Square(8)	0.3229

Berdasarkan nilai prob. Chi-Square sebesar 0,2981 yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test			
F-statistic	0.377496	Prob. F (2,13)	0.6919
Obs*R-squared	1.006337	Prob. Chi-Square (2)	0.6046

Berdasarkan nilai prob. Chi-Square sebesar 0,604 yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 124-132

Tabel 4 Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.43315	4.512529	12.50588	0.0000
X1	0.110935	0.206925	0.536110	0.5988
X2	-8.058255	2.095583	-3.845352	0.0013
X3	-2.113742	0.480524	-4.398823	0.0004

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4 maka dapat ditafsirkan sebagai berikut:
Model persamaan:

$$Y = 56.43315 + 0.110935\ X_1 - 8.058255\ X_2 - 2.113742\ X_3 + e$$

Nilai konstanta diperoleh sebesar 56.43315 persen, yang artinya apabila belanja bantuan sosial, korupsi dan tingkat pendidikan tidak berubah atau konstan, maka angka nilai rata-rata dari variable dependen (Y) 56.43315 persen. Nilai koefisien X1 ialah sebesar 0.110935 persen, yang berarti jika belanja bantuan sosial meningkat sebesar 1 persen, maka angka kemiskinan menurun 0.110935 persen dengan asumsi variabel belanja bantuan sosial, korupsi dan tingkat pendidikan konstan. Nilai koefisien X2 ialah sebesar -8.058255 persen, yang berarti apabila korupsi meningkat sebesar 1 satuan maka kemiskinan meningkat sebesar -8.058255 persen dengan asumsi variabel belanja bantuan sosial, korupsi dan tingkat pendidikan konstan. Nilai koefisien X3 ialah sebesar -2.113742 persen, yang berarti apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar 1 persen maka kemiskinan menurun sebesar -2.113742 persen dengan asumsi variable belanja bantuan sosial, korupsi dan tingkat pendidikan konstan.

Tabel 5 Hasil Uji Determinasi R-Square

R-squared	0.916656	Mean dependent var	12.06048
Adjusted R-squared	0.901949	S.D. dependent var	2.781488
S.E. of reqression	0.870971	Akaike info criterion	2.731288
Sum squared resid	12.89604	Schwarz criterion	2.930184
Log likelihood	-24.67789	Hannan-Quinn criter.	2.774406
F-statistic	62.32498	Durbin-Watson tat	1.506509
Prob (F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil pengujian R-squared sebesar 0,916, artinya persentase kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yakni belanja bantuan social, indeks persepsi korupsi dan tangkat Pendidikan adalah 91% dan sisanya yaitu 9% dijelaskan diluar model penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji F

R-squared	0.916656	Mean dependent var	12.06048
Adjusted R-squared	0.901994	S.D. dependent var	2.781488
S.E. of reqression	0.870971	Akaike info criterion	2.731228
Sum squared resid	12.89604	Schwarz criterion	2.930184
Log likelihood	-2467789	Hannan-Quinn criter.	2.774406
F-statistic	62.32498	Durbin-Watson tat	1.506509
Prob (F-statistic)	0.000000		

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 124-132

Berdasarkan uji f yang tercantum pada tabel 6, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 62.324. Selain itu uji probabilitas F statistik sebesar 0.0000, yang jauh dibawah 0,05. Dengan demikian, secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.43315	4.512529	12.50588	0.0000
X1	0.110935	0.206925	0.536110	0.5988
X2	-8.058255	2.095583	-3.845352	0.0013
X3	-2.113742	0.480524	-4.398823	0.0004

Hasil output di atas mengonfirmasi nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian regresi, yang menunjukkan adanya pengaruh parsial masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Ha1: Nilai signifikansi variabel belanja bantuan sosial sebesar 0.5988 > 0,05, T_{hitung} sebesar 0.536 lebih kecil dari T_{tabel} 2.100. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, H_1 ditolak.

Ha2: Nilai signifikansi variabel korupsi sebesar 0.0013 <0,05, dan nilai T_{hitung} sebesar-3.845 lebih besar dari T_{tabel} 2.100. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, H_2 diterima.

Ha3: Nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan sebesar 0.0004 <0,05, dan nilai T_{hitung} sebesar-4.398 lebih besar dari T_{tabel} 2.100. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, H_3 diterima.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel belanja bantuan sosial menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.5988 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T_{hitung} sebesar 0.536 yang lebih besar dari T_{tabel} 2.100. Artinya, ketika terjadi peningkatan belanja bantuan sosial, maka kemiskinan juga cenderung ikut meningkat. Secara teoritis dan praktis belanja bantuan sosial seharusnya mampu menekan angka kemiskinan namun temuan dilapangan bahwa realisasi belanja bantuan sosial tidak signifikan. Justru hasil ini bertentangan dengan teori Arthur Cecil Pigou bahwa bantuan sosial sebagai instrumen pemerintah yang efektif untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata yang pada gilirannya memaksimalkan total kesejahteraan sosial *(Utilitarianisme)* dan mengurangi kemiskinan karena utilitas marjinal uang bagi orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya. Menurut Todaro (1997) bantuan pemerintah berupa pembiayaan konsumsi berupa barang maupun jasa untuk kelompok masyarakat yang sangat miskin merupakan langkah penting dari suatu kebijakan secara terpadu untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Sekalipun secara teoritis peningkatan belanja bantuan sosial cenderung diharapkan menurunkan angka kemiskinan, namun pada kenyataanya efeknya belum cukup kuat untuk dapat di katakan berpengaruh secara nyata terhadap penurunan angka kemikinan di Indonesia.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 124-132

Hasil empiris menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dan mengindikasikan terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu memberikan temuan yang variatif. Penelitian oleh Alfath dkk, (2025) yang mengungkapkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini tujukan oleh nilai probabilitas sebesar 0.1532 lebih besar dari 0,05 terhadap kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0.142670. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu rupiah akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.142670 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Penelitian oleh Ayu & Prabowo (2021) hasil menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Agustin (2022) hasil penelitian menunjukkan belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Belanja bantuan sosial pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, hasil penelitian oleh Rarun dkk, (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Rossa & Fajri Ananda (2024) bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mununjukkan bahwa belanja bantuan sosial mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, bantuan sosial memberikan pendapatan ekstra yang secara langsung meningkatkan daya beli keluarga miskin agar dapat mencukupi kebutuhan esensial seperti sandang, pangan dan papan.

2. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil uji secara parsial, variable korupsi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel korupsi sebesar 0.0013 <0,05, dan nilai T_{hitung} sebesar-3.845 lebih besar dari T_{tabel} 2.100. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 poin CPI (yang menceriminkan menurunya tingkat korupsi) maka tingkat kemiskinan cendurung ikut menurun. Korupsi adalah penghalang struktural utama yang harus diselesaikan untuk mencapai pengetasan kemiskinan. Kemiskinan akan terus meningkat ketika tingkat korupsi dalam suatu negara sangat tinggi. Sehingga pemberatasan korupsi harus menjadi prasyarat utama dan kebijakan yang paling efektif dalam rangka memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima yang memiliki hak untuk menerimanya sehingga mampu menghasilkan dampak dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Korupsi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut Gupta, dkk (2002) dalam (Merry, 2025) menegaskan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan dengan mengalihkan sumber daya dari masyarakat miskin ke kelompok elit serta menghalangi kelompok miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui sektor-sektor kunci, yaitu pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi yang lain yang justru merupakan pilar utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Merry (2025) menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Yolanda & Alpon (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Semakin tinggi skor IPK artinya lebih bersih dan fenomena yang terjadi seperti belanja bantuan sosial yang efektif, distribusi yang adil, kemiskinan menurun. Sebaliknya, semakin rendah skor IPK korupsi tinggi seperti dana pembangunan bocor, investasi lesu, ketimpangan semakin buruk dan kemiskinan meningkat.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian parsial, nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan sebesar 0.0004 <0,05, dan nilai T_{hitung} sebesar-4.398 lebih besar dari T_{tabel} 2.100. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kemiskinan menurun. Pendidikan adalah kunci utama yang paling efektif untuk keluar dari persoalan kemiskinan karena pendidikan membekali seseorang dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan nilai dan produktivitasnya dengan demikian mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan Becker (1993) melalui teori *Human Capital*, teori ini mengasumsikan bahwa investasi dalam dunia pendidikan dapat membenahi kualitas produktifitas masyarakat, ketika kualitas pendidikan baik maka kualitas masyarakat juga semakin baik, pendidikan dapat membuat seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Millenia Putri & Zaini Putri (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nila Isroviyah (2020) hasil penelitian menujukkan bahwa pendidikan memilki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Idris Thahir dkk (2021) menunjukkan hasil penelitian yang sama dimana pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Juardi dkk (2023) memberikan hasil penelitian yang serupa dimana pendidikan berpengaruh sengatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyelamatkan seseorang dari jebakan kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membantu seseorang untuk terbebas dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh belanja bantuan sosial, korupsi, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan sosial tidak memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, indeks persepsi korupsi terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, di mana tingginya tingkat korupsi berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, tingkat pendidikan juga berperan penting, di mana pendidikan yang lebih tinggi cenderung mengurangi kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam program bantuan sosial agar lebih efektif dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta pengurangan korupsi. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sambil memperkuat investasi di sektor pendidikan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, dan Heris Kencana. 2022. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(1):288. doi: 10.33087/ekonomis.v6i1.501.

Agustin, Lisa. 2022. "Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7(2):262. doi: 10.30737/ekonika.v7i2.2221.

Ayu, Dyah Puspitaning, dan Prayudi Setiawan Prabowo. 2021. "Analisis Pengaruh Belanja Bantuan

sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018." *Independent: Journal of Economics* 1(1):170–85. doi: 10.26740/independent.v1n1.p170-185.

Alfath, Nurul Dieniah, Puti Andiny, Yani Rizal, Program Studi, Ekonomi Pembangunan, dan Universitas Samudra. 2025. "Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.

Ariwuni, Made Ade Dwi, dan I. Nengah Kartika. 2019. "Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal EP Unud* 8(12):2927–3958.

Idris Thahir, Muhammad, Baharuddin Semmaila, dan Aryati Arfah. 2021. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar." *Journal of Management Science (JMS)* 2(1):61–81. doi: 10.52103/jms.v2i1.323.

Juardi, Juardi, Muh. Arief Ariyanto Ahmad, dan Baso Iwang. 2023. "Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan." *Bulletin of Economic Studies (BEST)* 3(1):14–24. doi: 10.24252/best.v3i1.35588.

Merry, Wulandari. 2025. "Analisis Pengaruh Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Hukum Ekonomi Syariah* 03, No.01. doi: 10.59166/mizanuna.v3i1.314.

Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, I. Ketut Djayastra, dan I. G. .. Murjana Yasa. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali." *Journal Economics and Strategy* 101–110:115–23. doi: 10.36490/jes.v4i1.747.

Nila Isroviyah. 2020. "Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020." *Jurnal Penelitian* 1–23.

Rossa, Amelya, dan Candra Fajri Ananda. 2024. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan." *Journal of Development Economic and Social Studies* 3(3):803–13. doi: 10.21776/jdess.2024.03.3.11.

Yulsa, Haniyah Della, dan Idris. 2024. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* 1(4):602–9.

Yolanda, dan Satrianto Alpon. 2021. "Pengaruh Korupsi, Demokrasi Dan Politik Terhadap Kemiskinan Di Delapan Negara Asean Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1.